

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam mewujudkan sebuah strategi pemberantasan tindak pidana anti korupsi yang efektif dan terstruktur oleh aparatur sipil negara dibutuhkan pemenuhan peran seperti dorongan oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat, transparan serta bebas dari konflik kepentingan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS. Permasalahan penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk. Dari segi analisis penulis tidak setuju dengan putusan pidana yang hanya dikenakan pada pelaku, ada saksi yang ikut dalam tindak pidana korupsi meskipun dalam kategori tindakan saksi dalam putusan tersebut berasal dari paksaan oleh atasan yang dalam hal ini adalah pelaku utama korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Palangkaraya. Diharapkan agar ada pembaharuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal partisipasi, dan perlunya peran aktif dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama di aparatur sipil negara sehingga agar tidak merajalela dalam kehidupan masyarakat

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Analisis, Putusan Hakim, Korupsi

ABSTRACT

The rampant criminal act of corruption in the country not only harms the country's finances but has been a violation of the social and economic rights of the community at large, corruption is no longer a national problem, but has become a transnational phenomenon so that international cooperation is essential in preventing and eradicating it . The State Civil Apparatus (ASN) is a profession for Civil Servants and government employees with employment agreements working for government agencies. In realizing an effective and structured strategy to eradicate anti-corruption criminal acts by the state civil apparatus, fulfillment of roles such as encouragement by political will and strong commitment, transparency and freedom from conflicts of interest and growing public awareness about the destructive impact of corruption, especially for civil servants. The problem of this research is the application of law to the element of abuse of authority carried out by the state civil apparatus and the consideration of judges in deciding case number 22 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / Pn.Plk. In terms of the authors disagree with criminal decisions that are only imposed on perpetrators, there are witnesses who participated in criminal acts of corruption even though in the category of witness actions in the decision comes from coercion by superiors in this case are the main perpetrators of corruption committed by civil servants in Palangkaraya. It is hoped that there will be a renewal of the law regarding the eradication of criminal acts of corruption, especially in terms of participation, and the need for an active role in law enforcement in eradicating criminal acts of corruption, especially in the state civil apparatus so that it does not run rampant in people's lives.

Keyword: *State Civil Apparatus, Analysis, Judge's Decision, Corruption*